



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROPINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 13.A TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang:
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan alokasi dana kampung oleh daerah perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman penggunaan dana kampung (ADK)) setiap kampung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan Dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TAMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tambrauw yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tambrauw yang selanjutnya disebut DPMK adalah Perangkat Daerah sebagai unsure pelaksana urusan dibidang pemberdayaan masyarakat kampung.
5. Kepala Distrik adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
6. Kampung adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa dusun yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Distrik.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Pamong Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

10. Kepala Kampung adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Propinsi Papua Barat merupakan pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKamp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Alokasi Dana Kampung x yang selanjutnya disebut ADKx adalah total dana ADK yang diterima oleh sebuah Kampung.
15. Jumlah kampung yang selanjutnya disebut $\sum k$ adalah jumlah seluruh Kampung.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
19. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.

BAB II PENGELOLAN/ALOKASI ADK

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Dalam APBD

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kampung dapat mengalokasikan ADK paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari DTU.
2. DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar DTU yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
3. DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi; dan
 - c. Tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADK setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADK merupakan jumlah ADK yang diterima Kampung untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADK Untuk Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) Jumlah ADK yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 37.419.834.100 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Sen)
- (2) Setelah Perubahan jumlah ADK yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Menjadi Rp. 48.111.834.101 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Satu Rupiah)

Bagian Ketiga

Besaran Dana ADK Untuk Setiap Kampung

Pasal 5

- (1) Besaran dana ADK bagi setiap Kampung ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADK_x = \frac{ADK}{\sum k}$$
- (2) Besaran ADK untuk masing-masing kampung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penggunaan ADK

Pasal 6

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, khususnya untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Kampung, Pamong Kampung dan Staf Pamong Kampung;
 - b. Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
 - d. Operasional Pemerintah Kampung;
 - e. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Kampung, Pamong Kampung, Staf Pamong Kampung dan Staf Kampung; dan
 - f. Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Badan Permusyawaratan Kampung, Staf Pamong Kampung dan Staf Kampung.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, ADK diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah tercukupi, ADK dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran

Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dilakukan setelah Peraturan Kampung tentang APBKamp dan Peraturan kepala Kampung tentang Penjabaran APBKamp ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebanyak 4 (empat) tahap.

Paragraf Kedua
Mekanisme Penyaluran Tahap I (Kesatu)
Pasal 8

- (1) Persyaratan pencairan dana ADK tahap I (kesatu) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun 2023;
 - b. salinan Peraturan Kampung tentang APBKamp tahun 2023;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kampung; dan
 - d. fotokopi Rekening Kas Kampung (RKK).
- (2) Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK kepada Bupati melalui Kepala Distrik disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada tanggal 15 (lima belas), Kepala Distrik mengajukan permohonan penyaluran ADK untuk seluruh Kampung di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADK tiap Kampung; dan
 - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADK.
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan dana ADK kepada Bupati Cq. Kepala BPKD.
- (5) Penyaluran dana ADK tahap I (kesatu) dilakukan paling lambat akhir bulan April 2023 tahun berjalan.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Penyaluran Tahap Berikutnya
Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan dana ADK tahap berikutnya adalah sebagai berikut:
 - a. bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - b. kwitansi;
 - c. fotokopi rekening koran bulan sebelumnya;
 - d. fotokopi NPWP Pemerintah Kampung;
- (2) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Bupati melalui Kepala Distrik disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1(satu)bulan berikutnya ,kepala distrik mengajukan permohonan penyaluran ADK untuk seluruh Kampung di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. DPMK dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADK per Kampung; dan
 - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADK lembar penelitian berkas pengajuan penyaluranADK;
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan dana ADK kepada Bupati Cq. Kepala BPKD.
- (5) Penyaluran dana ADK tahap berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiapbulan.

Paragraf Ketiga

Pemotongan dan Penyetoran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenaga kerjaan dari ADK Pasal 10

- (1) Penanggung jawab administrasi JKN Kampung melakukan verifikasi data kepesertaan untuk Kepala Kampung, Sekretaris Kampung ,Kepala Seksi, Kepala Urusan dan BPK.
- (2) Penanggung jawab administrasi JKN Pemerintah Kabupaten melakukan persetujuan atas verifikasi data yang dilakukan oleh penanggung jawab administrasi JKN dan Jaminan Ketenaga kerjaan Kampung .
- (3) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan menyampaikan tagihan iuran untuk 1 (satu) Tahun berjalan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Kepala DPMK.

Paragraf Keempat

Penyaluran Ke Rekening Kas Kampung Pasal 11

- (1) BPKD selaku PPKD melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenaga kerjaan sebesar tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dari alokasi dana ADK yang diajukan berdasarkan permohonan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Maret 2023.
- (3) BPKD melakukan transfer ADK langsung ke Rekening Kas Kampung (RKK) setelah dikurangi tagihan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenaga kerjaan.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati melalui Kepala Distrik setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADK merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKamp.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Distrik dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tambrau dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKamp.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 23 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di Fef
pada tanggal 23 Oktober 2023

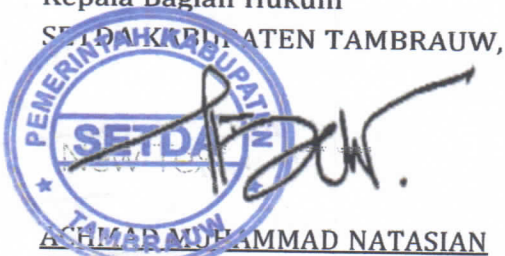
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHMAMMAD ZEN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 13.A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW,



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN

PENATA TINGKAT I (III/d)

NIP. 1982082820001121007

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TAMBRAUW

NOMOR : 13.A TAHUN 2023

TANGGAL : 23 OKTOBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BESARAN
ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADK TA 2023 SEMULA (Rp)	JUMLAH ADK TA 2023 MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	Fef	Fef	Rp 173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
2	Fef	Wayo	Rp 173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
3	Fef	Syubun	Rp 173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
4	Fef	Sikor	Rp 173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
5	Fef	Ibe	Rp173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
6	Fef	Syunam	Rp173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
7	Fef	Banfot	Rp173.239.972,69	Rp 222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
8	Fef	Iwin	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
9	Fef	Esyum	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
10	Fef	Imor	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
11	Miyah	Siakwa	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
12	Miyah	Aibogia	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
13	Miyah	Ayae	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
14	Miyah	Ayawit	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
15	Miyah	Aifair	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
16	Yembun	Baun	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
17	Yembun	Sumbekas	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
18	Yembun	Metnayam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
19	Yembun	Metbelum	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
20	Yembun	Salem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
21	Yembun	Metseba	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
22	Kwoor	Kwoor	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
23	Kwoor	Hopmare	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
24	Kwoor	Orwen	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
25	Kwoor	Barar	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
26	Kwoor	Esmambo	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
27	Sausapor	Sausapor	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
28	Sausapor	Emaos	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
29	Sausapor	Jokte	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
30	Sausapor	Uigwem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
31	Sausapor	Sungguwan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
32	Sausapor	Sau Uram	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
33	Sausapor	Nanggou	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
34	Sausapor	Bondek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
35	Sausapor	Bondongwan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
36	Sausapor	Syurauw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
37	Abun	Wau	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
38	Abun	Syuko	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
39	Abun	Waibem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
40	Abun	Weyaf	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
41	Abun	Weprari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
42	Syujak	Syujak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00

43	Syujak	Banso	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
44	Syujak	Iof	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
45	Syujak	Frafane	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
46	Moraid	Mega	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
47	Moraid	Selewok	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
48	Moraid	Malaworsai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
49	Moraid	Kwade	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
50	Moraid	Bonem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
51	Moraid	Warafor	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
52	Moraid	Warmasi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
53	Moraid	Warmanen	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
54	Moraid	Namuas	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
55	Kebar	Injai/Anjai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
56	Kebar	Apoki	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
57	Kebar	Matatun	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
58	Kebar	Jafai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
59	Kebar	Jambuani	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
60	Kebar	Manaria	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
61	Kebar	Anarum	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
62	Kebar	Wasanggon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
63	Kebar	Wabanek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
64	Amberbaken	Saukorem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
65	Amberbaken	Wefiani	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
66	Amberbaken	Wasarak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
67	Amberbaken	Binasi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
68	Amberbaken	Kabibwan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
69	Amberbaken	Binmaks	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
70	Amberbaken	Manggapnut	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
71	Amberbaken	Waramui	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
72	Amberbaken	Warpaperi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
73	Senopi	Senopi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
74	Senopi	Arap	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
75	Senopi	Srurem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
76	Senopi	Sumo	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
77	Senopi	Ifat Mitu	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
78	Senopi	Povokek Ania	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
79	Senopi	Thomas	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
80	Senopi	Tintum Araw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
81	Senopi	Hobiah	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
82	Mubrani	Arfu	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
83	Mubrani	Bawey	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
84	Mubrani	Wasnembri	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
85	Mubrani	Waru	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
86	Mubrani	Atori	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
87	Mubrani	Meriambeker	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
88	Mubrani	Warokon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
89	Mubrani	Arekon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
90	Mubrani	Bonpaya	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
91	Mubrani	Marbuan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
92	Bikar	Werur	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
93	Bikar	Bukit	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
94	Bikar	Wertam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
95	Bikar	Werwaf	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
96	Bikar	Werbes	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
97	Bikar	Nombrak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
98	Bikar	Bikar	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00

99	Bikar	Syunai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
100	Bikar	Suyam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
101	Bikar	Wertim	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
102	Bamusbama	Bamusbama	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
103	Bamusbama	Bamuswaiman	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
104	Bamusbama	Syanwom	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
105	Bamusbama	Babak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
106	Bamusbama	Bano	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
107	Bamusbama	Wormon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
108	Ases	Ases	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
109	Ases	Asuon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
110	Ases	Safotiek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
111	Ases	Frasayoah	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
112	Miyah Selatan	Mawor	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
113	Miyah Selatan	Ruf	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
114	Miyah Selatan	Ayamane	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
115	Miyah Selatan	Whismer	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
116	Miyah Selatan	Sahae	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
117	Miyah Selatan	Hewi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
118	Miyah Selatan	Sisu	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
119	Miyah Selatan	Ruweges	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
120	Miyah Selatan	Yabouw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
121	Ileres	Miri	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
122	Ileres	Meis	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
123	Ileres	Aifamas	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
124	Ileres	Meinad	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
125	Ileres	Atafrumek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
126	Ileres	Ifiam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
127	Ileres	Wufmana	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
128	Tobouw	Syumbab	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
129	Tobouw	Krisnos	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
130	Tobouw	Syukwes	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
131	Tobouw	Sunggak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
132	Tobouw	Omom / WOMOM	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
133	Tobouw	Resye	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
134	Wilhem Roumbouts	Tabamsere	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
135	Wilhem Roumbouts	Sayam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
136	Wilhem Roumbouts	Araf Mafat	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
137	Wilhem Roumbouts	Esyuom	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
138	Tinggouw	Tinggouw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
139	Tinggouw	Hohair	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
140	Tinggouw	Ruriai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
141	Tinggouw	Soon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
142	Tinggouw	Ifatkan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
143	Kwesefo	Jokbujoker	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
144	Kwesefo	Kranfotsu	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
145	Kwesefo	Syuau	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
146	Kwesefo	Kwesefo	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
147	Kwesefo	Batdey	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
148	Kwesefo	Syumbi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
149	Kwesefo	Bao	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
150	Kwesefo	Donan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
151	Kwesefo	Dombron	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00

152	Mawabuan .	Wausin	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
153	Mawabuan .	Asiti	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
154	Mawabuan .	Bisaud	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
155	Mawabuan .	Nisandauw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
156	Mawabuan .	Afrawi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
157	Mawabuan .	Ajokwapi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
158	Kebar Timur	Inam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
159	Kebar Timur	Jandurauw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
160	Kebar Timur	Inambuari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
161	Kebar Timur	Sitori	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
162	Kebar Timur	Untorey	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
163	Kebar Timur	Nabisai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
164	Kebar Timur	Arumi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
165	Kebar Timur	Karawi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
166	Kebar Timur	Arapak	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
167	Kebar Timur	Barona	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
168	Kebar Selatan	Nekori	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
169	Kebar Selatan	Ajami	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
170	Kebar Selatan	Aniti	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
171	Kebar Selatan	Akari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
172	Kebar Selatan	Amnan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
173	Kebar Selatan	Atiki	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
174	Kebar Selatan	Arwani	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
175	Kebar Selatan	Aritowi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
176	Kebar Selatan	Umpay	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
177	Kebar Selatan	Meiwar	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
178	Manekar	Atai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
179	Manekar	Akmuri	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
180	Manekar	Awori	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
181	Manekar	Itafiti	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
182	Manekar	Atunari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
183	Manekar	Ajami Waripi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
184	Manekar	Narai	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
185	Manekar	Aranari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
186	Manekar	Waumi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
187	Manekar	Aneti	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
188	Mpur	Arupi	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
189	Mpur	Mangganek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
190	Mpur	Wajarek	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
191	Mpur	Kali An	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
192	Mpur	Araro	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
193	Mpur	Wekari	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
194	Mpur	Serayo	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
195	Amberbaken Barat	Sasui	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
196	Amberbaken Barat	Imbuan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
197	Amberbaken Barat	Manggaew	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
198	Amberbaken Barat	Saurabon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
199	Amberbaken Barat	Wasawmontem	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
200	Kasi	Meserikweda	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
201	Kasi	Kasi Baru	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
202	Kasi	Kasi Jaya	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
203	Kasi	Meimorufof	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
204	Kasi	Kasi Indah	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00

205	Kasi	Wacam	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
206	Kasi	Irumfei	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
207	Kasi	Pubuan	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
208	Kasi	Ireji	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
209	Kasi	Kasih Inom	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
210	Kasi	Meycocforga	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
211	Kasi	Meyomnar	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
212	Selemkai	Della	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
213	Selemkai	Malayauw	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
214	Selemkai	KIASBON/KLAS EI	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
215	Selemkai	Klasbon	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
216	Selemkai	Klabili	Rp173.239.972,69	Rp222.739.972,69	Rp 49.500.000,00
TOTAL			Rp 37.419.834.101,04	Rp 48.111.834.101,04	Rp 10.692.000.000,00

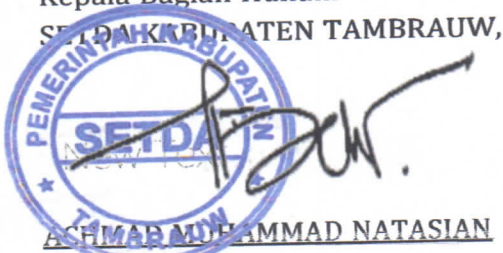
Ditetapkan di Fef
pada tanggal 23 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW,



ACHMAD HAMMAD NATASIAN

PENATA TINGKAT I (III/d)

NIP. 1982082820001121007

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 1 Februari 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di Fef
pada tanggal 1 februari 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHMAMMAD ZEN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW,

